

**ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIFITAS KEUANGAN
DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN POSO**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Sintuwu Maroso

Oleh

Nurjanih Polutu

91911404122017

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
2023**

Nurjanah Polutu, 91911404122017, “Analisis Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Poso”. Dibimbing oleh Pembimbing I Ilyas Martunus dan Pembimbing II Irma Mbae

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Poso ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berupa laporan realisasi APBD Kabupaten Poso tahun 2018 - 2022. Teknik analisis data yang digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah rata-rata sebesar 10,23% atau berada pada skala Interval “Rendah Sekali” dengan pola hubungan yang diterapkan “Instruktif” karena berada dibawah 25%. Sedangkan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 101,31% yang mana masuk pada kategori kemampuan keuangan “Sangat Efektif” karena berada di atas 100% (>100%).

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	8
2.1.1 Manajemen Keuangan Daerah.....	8
2.1.2 Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah.....	8
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	12
2.1.4 Analisis Rasio Keuangan Pada APBD.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.2 Metode Penelitian	24
3.3 Data dan Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25

3.5 Populasi dan Sampel	26
3.6 Teknik Analisis Data.....	26
3.7 Definisi Operasional	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	29
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Poso.....	29
4.1.2 Gambaran Umum BKAD Kabupaten poso.....	32
4.1.3 Analisis Data.....	35
4.2 Pembahasan	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pemerintah memerlukan manajemen keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan serta pemerintah juga berkewajiban mengelola potensi daerah secara optimal baik dari potensi SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia) dan Sumber Daya Keuangan. Keberhasilan pemerintah dalam mengelola potensi-potensi tersebut dapat menunjukkan tingkat kinerja keuangan pemerintah dalam membiayai pembangunan di daerahnya.

Menurut Halim kinerja keuangan pemda adalah kemampuan daerah untuk menghasilkan dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhan serta mendukung system pemerintahan agar tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Dalam pengukuran kemampuan pemerintah daerah penting untuk menetapkan standar/acuan suatu daerah bisa dikatakan efektif, mandiri, efisien dan akuntabel, oleh karena itu diperlukan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam kebijakan keuangan pada tahun anggaran berikutnya.(Budianto, 2021)

Tolak ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan suatu pemerintah daerah untuk dapat membantu memahami, mengevaluasi dan mengkaji angka-angka pada laporan keuangan daerah menjadi suatu informasi yang dapat dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan yaitu dengan

menggunakan analisis rasio keuangan daerah berdasarkan data yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Halim bahwa rasio keuangan digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemda seperti, rasio efektifitas, rasio efesiensi, rasio keserasian, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan serta rasio proporsi pendapatan dan belanja daerah.(Saputra, 2014)

Rasio kemandirian digunakan untuk menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap dana eksternal seperti pinjaman dan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, rasio ini juga sekaligus menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah. Sedangkan rasio efektivitas digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso juga berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya keuangan yang ada di Kabupaten Poso salah satunya dengan menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat dilihat arah perkembangannya melalui data-data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.1

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011-2015

Dalam Ribuan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman (BPP)	Hasil Rasio Kemandirian $\left(\frac{PAD}{BPP} \times 100\%\right)$	Kemampuan Keuangan/Pola Hubungan
2011	25.654.922	525.463.131	4,88%	Rendah Sekali/Instruktif
2012	26.266.376	603.141.172	4,35%	Rendah Sekali/Instruktif
2013	34.643.597	694.153.468	4,99%	Rendah Sekali/Instruktif
2014	66.734.660	751.417.024	8,88%	Rendah Sekali/Instruktif
2015	69.329.684	894.755.041	7,75%	Rendah Sekali/Instruktif

Sumber : Kisman Lantang (2018)

Berdasarkan hasil penelitian Kisman Lantang (2018) secara umum Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 tahun terhitung dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 rata-rata sebesar 6,17% yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah berada pada skala interval “Rendah Sekali” yang berarti daerah Kabupaten Poso belum mampu melaksanakan Otonomi Daerah secara optimal dengan pola hubungan yang diterapkan “Instruktif” karena berada dibawah 25% dimana menggambarkan bahwa peranan Pemerintah Pusat masih lebih dominan dari pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan Pemerintah

Daerah. Walaupun begitu dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan PAD dari tahun ke tahun yang diikuti dengan peningkatan BPP.

Tabel 1.2

**Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011-2015
Dalam Ribuan**

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Hasil Rasio Efektifitas Realisasi PAD ($\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$)	Kriteria
2011	27.822.037	25.654.922	92,21%	Efektif
2012	29.906.352	26.226.376	87,70%	Cukup Efektif
2013	34.331.126	34.643.597	100,91%	Sangat Efektif
2014	56.458.111	66.734.660	118,20%	Sangat Efektif
2015	69.489.367	69.329.684	99,77%	Efektif

Sumber : Kisman Lantang (2018)

Sementara Rasio Efektivitas Daerah (REKD) pada Kabupaten Poso rata-rata sebesar 99,76% ini berarti bahwa PAD di Kabupaten Poso belum dilaksanakan secara efektif karena berada dibawah 100%, walaupun pada tahun 2013 dan 2014 sudah dilaksanakan secara efektif karena berada di atas 100%. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada dasarnya realisasi PAD sudah mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Poso terus berusaha meningkatkan PAD baik itu dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Menghadapi fenomena rendahnya kemampuan keuangan daerah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah (RKKD) dan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (REKD). Oleh karena itu penulis mengambil judul “**Analisis Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Poso**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)?
- 2) Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Poso ditinjau dari Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (REKD)?
- 3) Bagaimana *Trend* Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Pada Pemerintah Kabupaten Poso?
- 4) Bagaimana *Trend* Efektifitas Keuangan Daerah (REKD) Pada Pemerintah Kabupaten Poso?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok yang ditemukan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso selama lima tahun terakhir (2018-2022) berdasarkan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD).

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso selama lima tahun terakhir (2018-2022) berdasarkan Analisis Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (REKD).
3. Perkiraan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Poso berdasarkan *Trend* Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) selama lima tahun terakhir (2018-2022).
4. Perkiraan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Poso berdasarkan *Trend* Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (REKD) selama lima tahun terakhir (2018-2022).

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Adapun manfaat Praktis dari penelitian ini, diantaranya :
 - a. Dari hasil penelitian diharapkan bahwa skripsi ini dapat berpengaruh atau berkontribusi positif dalam pengelolaan keuangan daerah untuk perkembangan Otonomi Daerah dan desentralisasi yang baik bagi kota poso.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
- 2) Adapun manfaat Teoritis dari penelitian ini, diantaranya :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi dokumentasi yang kelak akan mendukung kegiatan akademik.

- b. Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. 2019. *MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Azkiya Publishing.
- Andirfa, M. 2018. *KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, “Suatu Kajian Terkait Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh”*. Unimal Press. 1–87.
- Budianto, A. (2021). *Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020*. Jurnal Statistisi Diskominfo Kab. Magelang Abstrak, 32, 1–18.
- Firdaus, F. (2020). *Analisis Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam, 1(2), 32–43.
- Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.Syam. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah - Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lantang, K. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso*. *Ekomen*, 18(2), 20-29.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Mahsun, Mohamad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV Andi Offset Mahmudi.
- Mariasari, V., & Sunaningsih, S. N. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Periode 2018-2020*. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 7(2).
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Public*. Salemba Empat. Jakarta
- Patarai, M. I. 2018. *Kinerja Keuangan Daerah*. Goenawan. De La Macca.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- Saputra, D. (2014). *Analisis Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatra Barat*. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 3–31.

Sari, R. K., Woestho, C., & Handayani, M. (2021). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1).

Subaja, K. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020. Jurnal Ekomen*, 147-154.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan*